

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Pariwisata memiliki peran dan fungsi penting pada mendorong pertumbuhan ekonomi negara tidak terkecuali Indonesia. Sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap kontribusi signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) selain dalam hal perekonomian negara sektor pariwisata dapat memberikan dan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendorong pembangunan infrastruktur. Di Indonesia pariwisata juga menjadi salah satu sektor berpeluang tinggi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, mengingat kekayaan alam dan budaya yang Indonesia miliki. Oleh sebab itu, pengembangan wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia pada tingkat global (Hendaru et al., 2024).

Potensi yang dimiliki suatu daerah maupun desa mempunyai dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti hotel, penginapan, wisma, homestay, restoran, rumah makan, ojek wisatawan, dan infrastruktur pendukung lainnya yang ada di pariwisata (Hendaru et al., 2024). Desa wisata memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru (cipatujah-tasikmalaya.desa.id, 2024). Hal ini sangat penting bagi sebuah desa yang biasanya mengalami keterbatasan dalam hal akses

ke pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya. Desa wisata membantu masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal, seperti keunikan alam, adat istiadat, budaya, dan produk lokal untuk dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata yang mampu menarik turis baik domestik maupun turis dari mancanegara.

Provinsi Jawa Tengah sendiri merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai sektor telah berkembang pesat di provinsi ini termasuk dalam sektor pariwisata. Sebagai salah satu sektor yang cukup kuat dan sebagai andalan pariwisata memainkan peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah baik melalui pengeluaran wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Jawa Tengah telah aktif melakukan pengembangan diberbagai destinasi wisata yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang beragam mulai dari wisata alam, budaya, sejarah hingga religi. Setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik tersendiri yang mampu menarik wisatawan.

Salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik tinggi dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal pariwisata di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menyatakan bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten di kawasan strategis nasional subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Kabupaten Karanganyar ini dulunya

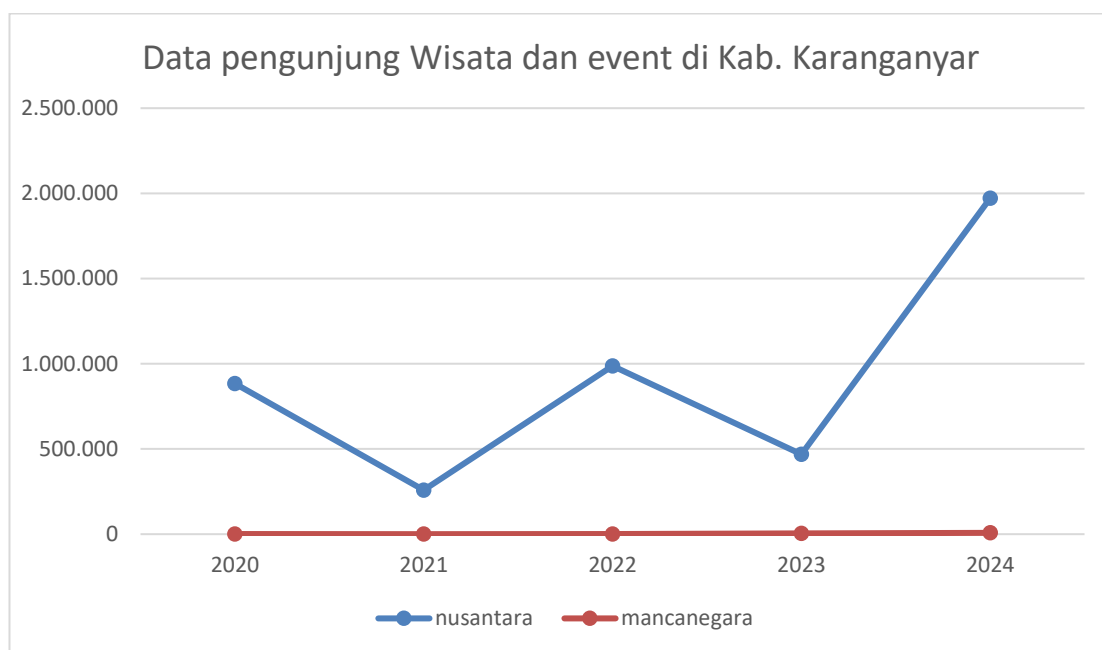
lebih dikenal dengan sektor pertanian dan perkebunan, namun seiring dengan kemajuan zaman dan adanya daya dukung infrastruktur yang semakin memadai seperti akses jalan yang lebih baik, transportasi umum, dan juga fasilitas pendukung lainnya. Kabupaten Karanganyar kini telah bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Perubahan ini menandai pergeseran penting dalam peran Kabupaten Karanganyar dalam ekonomi, dari daerah agraris menjadi wilayah dengan potensi pariwisata yang terus berkembang. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata yang mengatur peran berbagai *stakeholders* dalam pengembangan desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Selain, pemerintah pengembangan desa wisata dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), BUMDes, serta pelaku usaha wisata yang bertanggung jawab dalam penyediaan atraksi wisata, usaha pariwisata, serta sarana dan prasarana yang mendukung kenyamanan wisatawan (Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa Wisata).

Kabupaten Karanganyar menawarkan beragam destinasi wisata yang memiliki daya tarik unik bagi wisatawan. Keindahan alamnya, seperti Lereng Gunung Lawu, Air Terjun Grojogan Sewu, dan Perkebunan Teh Kemuning, menjadi daya tarik utama yang membedakan Karanganyar dari daerah lain (Karanganyarkab.go.id, 2024). Wisatawan dapat menikmati pemandangan alam yang asri sambil merasakan suasana pedesaan yang masih kental. Selain itu,

keberadaan situs-situs sejarah dan budaya seperti Candi Sukuh dan Candi Cetho yang berusia ratusan tahun juga menambah nilai sejarah yang membuat sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar semakin menarik. Kabupaten Karanganyar menjadi daerah peringkat ke 3 dengan kunjungan wisata terbanyak di Jawa Tengah.

Tabel 1. 1 Banyaknya Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah



Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan grafik “Data Pengunjung Wisata dan Event di Kabupaten Karanganyar” tahun 2020–2024, terlihat bahwa jumlah wisatawan nusantara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung nusantara tercatat sekitar 900 ribu orang, kemudian menurun drastis pada 2021 menjadi sekitar 250 ribu orang. Tahun 2022 jumlahnya kembali naik hingga sekitar 1 juta orang, lalu kembali turun di 2023 menjadi sekitar 450 ribu orang. Peningkatan

terbesar terjadi pada 2024, di mana jumlah pengunjung nusantara melonjak tajam hingga sekitar 2 juta orang. Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara relatif stabil dengan angka yang jauh lebih rendah dibanding wisatawan nusantara. Tahun periode 2020–2024, jumlahnya berkisar di bawah 20 ribu orang. Data ini menunjukkan bahwa wisatawan nusantara masih menjadi mayoritas pengunjung di Karanganyar, meskipun terdapat sedikit tren kenaikan kunjungan dari wisatawan mancanegara pada tahun terakhir. Berikut merupakan tabel desa wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar:

Tabel 1. 2 Desa Wisata Yang Ada Di Kabupaten Karanganyar

NO	Desa Wisata	Kecamatan	Destinasi wisata
1.	Kampung Wisata Barokah	Karangpandan	Wisata Edukasi (Pertanian, Peternakan, Memanah, Berkuda), Wisata Alam Pedesaan, Homestay
2.	Desa Wisata Sumberbulu	Mojogedang	Sendang Air, Pohon Bulu, Kesenian Daerah, Camping Ground
3.	Desa Wisata Umbul Udal-Udalan	Tawangmangu	Kolam Renang/Umbul Mata Air, Kesenian Daerah, Wisata Edukasi
4.	Desa Wisata Pancot	Tawangmangu	Alam (Kedung Sriti, dll), Seni Reog, Tubing, Outbound
5.	Desa Wisata Plesungan	Gondangrejo	Kolam Renang, Kesenian Daerah, Taman Edukasi, Wisata Budaya
6.	Desa Wisata Girimulyo	Ngargoyoso	Air Terjun Parangijo, Kolam Renang, Flying Fox
7.	Kampung Wisata Klatak	Karangpandan	Lukisan Mural, Kesenian Daerah, Wisata Edukasi, Jembatan Selfi
8.	Desa Wisata Wonorejo Elok	Jatiyoso	Wisata Edukasi, Kesenian Daerah, River Tubing, Air Terjun Buto Ijo
9.	Kampung Wisata Sewu Kembang	Tawangmangu	Situs Menggung, Jurang Sundo, Bumi Perkemahan, Museum Lumpang
10.	Desa Wisata Berjo	Ngargoyoso	Telaga Madirda, Air Terjun Jumog, Candi Sukuh

11.	Desa Wisata Batik Girilayu	Matesih	Batik Girilayu, Tubing Kali Mangadeg, Astana Mangadeg
12.	Desa Wisata Sendang Bejen	Mojogedang	Sendang Bejen, Kolam Renang, Jembatan Selfi
13.	Desa Wisata Kemuning	Ngargoyoso	Wisata Kebun Teh, Pasar Mbatok, River Tubing
14.	Desa Wisata Anggrasmanis	Jenawi	Embung Banyu Kuwung, Kesenian Daerah, Tempat Selfi
15.	Desa Wisata Kampung Purba Dayu	Gondangrejo	Wisata Edukasi, Kesenian Daerah, Mata Air Sumur Emas, Museum Purba
16.	Desa Wisata Lembah Dongde	Mojogedang	Pasar Bahulak Ciplukan, Kesenian Daerah, River Tubing
17.	Desa Wisata Gempolan	Kerjo	Wisata Edukasi, Wahana Selfi, Kesenian Daerah
18.	Desa Wisata Alaska	Kerjo	Wisata Edukasi, Kesenian Daerah, Tempat Selfi, Kolam Renang
19.	Desa Wisata Taman Sari	Kerjo	-
20.	Desa Wisata Pablengan	Matesih	-
21.	Kampung Wisata Sekipan	Tawangmangu	Wahana Selfi, Camping Ground, Wisata Petik Stroberi
22.	Desa Wisata Cetho	Jenawi	Candi Cetho, Candi Kethek, Kesenian Daerah, Kirab Budaya
23.	Kampung Wisata Blumbang	Tawangmangu	Pringgodani, Kirab Budaya Mondhosiyo, Wisata Pertanian, Camping
24.	Agro Wisata Kembang Desa Dawung	Matesih	Taman Bunga Dawung, Kolam Renang, Wisata Edukasi

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 556/378 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar, Surat Keputusan Dinas Nomor 556/05.15/2021 yang menyebutkan banyaknya desa wisata yang terdapat di Kabupaten Karanganyar, salah satu dari banyaknya desa wisata adalah Desa Wisata Berjo yang terletak di Kelurahan Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Surat Keterangan ini juga menyebutkan bahwa dalam Desa Wisata

Berjo ini terdapat tiga wisata diantaranya, Air Terjun Jumog, Telaga Mardiga, dan juga Candi Sukuh.

Desa Wisata Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dalam perkembangannya, pengelolaan BUMDes Alam Berjo sempat menghadapi permasalahan tata kelola pada priode 2019-2024, yaitu kasus korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan tiket masuk objek wisata yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah serta menunjukkan adanya praktik pengelolaan dana yang kurang transparan (Metrotvnews, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan adanya tantangan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes sebagai lembaga pengelola utama destinasi wisata dan juga sebagai lembaga ekonomi desa. Meskipun demikian, sektor pariwisata di Desa Berjo tetap menunjukkan potensi yang besar dengan kontribusi terhadap pendapatan desa dan perekonomian masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya dinamika pengelolaan pariwisata desa yang melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti pemerintah desa, BUMDes, Komunitas BENTUR, masyarakat desa, dan juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam melihat peran *stakeholders* dalam mendukung keberlanjutan pengembangan desa wisata. Keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Berjo dapat dilihat dari sektor usaha jasa wisata, yang mana usaha jasa wisata merupakan salah satu sarana prasarana pariwisata yang dijalankan oleh penduduk lokal (Arvia.A.S., 2015).

Desa Berjo dikenal dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah tersebut. Salah satu daya tarik utama di Desa Wisata Berjo adalah Wisata Alam Jumog, yang

terkenal dengan keindahan alam berupa air terjun Jumog. Air Terjun Jumog telah dibuka untuk umum sejak tahun 2004 oleh Bupati Kabupaten Karanganyar pada saat itu. Air Terjun Jumog menyajikan keasrian alami air terjun dengan tersedianya aneka fasilitas pendukung wisata yang ada. Air Terjun Jumog ini merupakan kepemilikan dari BUMDes Desa Berjo.

Sejak resmi dikelola sebagai Desa Wisata pada tahun 2008, Desa Berjo dengan ikon unggulannya Air Terjun Jumog memiliki modal yang kuat untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar. Desa Berjo memiliki potensi alam yang menarik yang seharusnya dapat menjadi modal untuk mencapai status “Desa Wisata Maju” atau bahkan “Mandiri” sesuai dengan kriteria pengembangan desa wisata. Sejak diresmikan menjadi desa wisata, Desa Berjo telah memiliki rentan waktu lebih dari 15 tahun yang mana idealnya berbagai aspek pengelolaan telah matang. Mulai dari peningkatan fasilitas wisata, penguatan promosi, hingga pengoptimalisasi pendapatan desa. Selain itu juga, Infrastruktur pendukung seperti akses jalan, tempat parkir, toilet, pusat informasi, dan area kuliner seharusnya tertata rapi dan juga terawat. Pendapatan dari sektor ini juga semestinya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) serta berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Desa Berjo.

Wisata Alam Jumog melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti BUMDes, Pemdes, Komunitas. Masyarakat lokal (pelaku usaha), dan juga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa objek wisata ini memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan desa wisata. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun

2024 Wisata Alam Air Terjun Jumog tercatat dikunjungi sebanyak 396.895 wisatawan dan menjadikannya salah satu destinasi dengan jumlah kunjungan tertinggi di Kabupaten Karanganyar (Krjogja, 2025).

BUMDes sebagai salah satu *stakeholder* kunci secara Wisata Aalam Jumog merupakan wisata di bawah kepemilikannya. Berdasarkan hasil penelitian (Bayu et al. 2023) bahwa dalam pengembangan Wisata Alam Jumog Jumog peran *stakeholders* masih belum optimal, salah satunya ditandai dengan pengelolaan oleh BUMDes yang kurang transparan dan akuntabel, serta adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan pengurus BUMDes Desa Berjo. Peran BUMDes yang seharusnya mengelola pendapatan dan mengalokasikan dana untuk perbaikan fasilitas, serta pemberdayaan masyarakat menjadi terganggu dan tidak terlaksanakan secara maksimal. Selain itu, desa ini telah dinyatakan menjadi desa wisata sejak tahun 2008, namun hingga saat ini status Desa Wisata Berjo masih tergolong dalam desa “berkembang” (Jadesta.com 2025). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara potensi dan pencapaian Desa Berjo sebagai desa wisata. Desa Berjo masih berstatus berkembang karena masih minimnya promosi dan ketatnya persaingan antara Destinasi wisata di daerah yang sama. Selain itu juga kondisi lapangan menunjukkan bahwa program yang diberikan oleh salah satu *stakeholders* external tidak tersalur kepada kelompok sasaran, dimana pelatihan yang harusnya diberikan kepada kelompok sasaran tidak tersalurkan.

Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadikan tolak ukur status perkembangan desa yang ditentukan berdasarkan nilai indeks yang

mengukur ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan (Syahdan et al., 2024). Desa maju dengan IDM pada rentan 0,707-0,815 yang menunjukkan bahwa potensi sumber daya yang berkembang, pelayanan dasar yang cukup baik, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang relatif stabil (Syahdan et al., 2024). Sementara Desa mandiri dengan IDM di atas 0,815 yang menunjukkan bahwa desa yang memiliki tingkat kemandirian membangun tang tinggi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi dan sumber daya secara berkelanjutan (Syahdan et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Berjo memiliki potensi yang cukup besar, terutama melalui keberadaan Wisata Alam Jumog yang menjadi destinasi wisata dengan jumlah kunjungan wisata tertinggi di desa tersebut serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa dan perekonomian masyarakat. Namun, berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes, termasuk permasalahan tata kelola yang pernah muncul, menunjukkan bahwa potensi wisata yang besar tersebut menghambat Desa Berjo dalam mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) desa maju dan mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Wisata Alam Jumog tidak hanya berkaitan dengan potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga dengan bagaimana peran berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pengembangannya. Oleh karena itu, Wisata Alam Jumog menjadi penting di teliti untuk melihat bagaimana peran *stakeholders* dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang peran *stakeholders* di desa wisata, lebih banyak yang terfokus pada salah satu *stakeholders* saja. Namun, masih sedikit

yang meneliti bagaimana peran setiap *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan menggambarkan peran seluruh *stakeholders* yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Wisata Berjo ini. Penelitian ini berfokus pada pentingnya memahami bagaimana peran masing-masing *stakeholders* dapat menciptakan keberlanjutan dan menjaga eksistensi Wisata Alam Jumog. Penelitian ini akan menelaah strategi dan kebijakan pemerintah desa, inovasi serta kontribusi Pokdarwis atau komunitas dalam pengelolaan dan promosi, partisipasi masyarakat lokal, hingga dukungan dari sektor swasta.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran setiap *stakeholder* berkontribusi terhadap pengembangan desa wisata yang telah beroperasi lebih dari satu dekade namun belum mencapai status desa wisata maju. Minimnya kajian yang membahas peran seluruh *stakeholder* secara menyeluruh membuat penelitian ini penting dilakukan, karena hasilnya dapat menjadi dasar perumusan strategi pengelolaan dan pengembangan yang lebih efektif. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah desa, BUMDes, Komunitas, dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan perannya sehingga pengembangan Wisata Alam Jumog dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah diantaranya;

1. Permasalahan tata kelola BUMDes Desa Berjo, termasuk kasus korupsi yang terjadi, menimbulkan tantangan dalam mewujudkan pengelolaan wisata yang transparan dan akuntabel.
2. Komunitas dan masyarakat lokal yang masih memiliki keterbatasan dalam keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal destinasi wisata Jumog di Desa Berjo ini.
3. Tidak tersalurnya program pelatihan yang diberikan oleh *stakeholders* kepada kelompok sasaran.
4. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke Wisata Alam Air Terjun Jumog belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola kolaboratif yang efektif, sehingga potensi ekonomi wisata belum dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat desa.
5. Permasalahan koordinasi dan tata kelola wisata desa berpotensi mempengaruhi upaya Desa Berjo dalam mencapai status desa maju maupun desa mandiri berdasarkan IDM yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini;

1. Bagaimana peran dari masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo?
2. Apa aspek pendukung dan aspek penghambat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian;

1. Menganalisis bagaimana peran yang dijalankan setaip *stakeholders* dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo.
2. Menganalisis aspek yang menjadi pendukung dan aspek yang menjadi penghambat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog di Desa Berjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pariwisata dan manajemen pembangunan desa wisata. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang peran stakeholder dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan serta tantangan dalam pengembangan desa wisata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan Wisata Alam Jumog. Bagi pemerintah dan pengelola desa wisata, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif serta memperkuat peran *stakeholders* dalam pengelolaan desa wisata. Bagi *stakeholders* desa wisata, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran mereka, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengembangan desa wisata. Selain itu, masyarakat lokal dapat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung pengelolaan desa wisata demi peningkatan kesejahteraan ekonomi.

1.5 Kerangka teoritis

1.5.1 State Of The Art

Tabel 1. 3 State of the art

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Government investment, level of marketization and high-quality tourism development (Zhang et al., 2024)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi pemerintah dan tingkat komersialisasi terhadap pengembangan pariwisata berkualitas tinggi, serta menjelaskan peran inovasi teknologi sebagai variabel perantara dalam hubungan antara investasi pemerintah dan pengembangan pariwisata berkualitas tinggi.	Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara investasi pemerintah, tingkat komersialisasi, dan pengembangan pariwisata berkualitas tinggi, dengan inovasi teknologi dan struktur industri sebagai variabel perantara. Investasi pemerintah berperan dalam pengembangan infrastruktur, perlindungan sumber daya, inovasi produk pariwisata, dan pemasaran destinasi. Sementara itu, komersialisasi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, daya saing pasar, dan inovasi layanan. Inovasi teknologi mendukung efisiensi	Analisis empiris dilakukan pada data panel provinsi dari tahun 2012 hingga 2022, yang diambil dari berbagai data resmi. Pengembangan pariwisata berkualitas tinggi (TR) adalah variabel dependen dari penelitian ini, sedangkan investasi pemerintah (IM) dan tingkat komersialisasi (Ind) adalah variabel independen. Variabel mediasi terdiri dari inovasi teknologi (RD) dan struktur industri (TL), dengan variabel kontrol seperti aksesibilitas, keterbukaan ekonomi, dan modal manusia. Untuk memastikan kestabilan hasil, model regresi panel digunakan untuk melihat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat komersialisasi dan investasi pemerintah memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata yang baik. Inovasi teknologi memediasi hubungan antara investasi pemerintah dan pengembangan pariwisata, dan struktur industri memediasi hubungan antara komersialisasi dan pertumbuhan pariwisata. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
			operasional, pengalaman pariwisata berbasis teknologi, dan keberlanjutan industri, sedangkan struktur industri yang berkembang mempercepat adopsi teknologi dan diversifikasi sektor pariwisata. Dengan demikian, investasi pemerintah dan komersialisasi berfungsi sebagai pendorong utama pengembangan pariwisata berkualitas tinggi, dengan inovasi dan struktur industri sebagai faktor penguat.	bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak investasi pemerintah dan komersialisasi terhadap pengembangan pariwisata berkualitas tinggi.	pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi dapat didorong oleh investasi strategis dan pasar yang kompetitif.
2	Community-Based Tourism Village Development Strategies: A Case Of Borobudur Tourism Village Area, Indonesia	tujuan pengembangan pariwisata desa-desa di kawasan Borobudur, tiga strategi yang berfokus pada kelemahan-peluang, kekuatan-ancaman, dan	teori collaborative governance. Menurut Jung et al. (2009), collaborative governance adalah proses lintas sektor untuk menyelesaikan masalah kebijakan publik yang tidak bisa diatasi oleh satu	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap peristiwa atau fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi selama penelitian berlangsung, tetapi	Menurut hasil analisis SWOT, strategi pengembangan desa wisata berfokus pada strategi kekuatan-peluang sebagai strategi utama. Penguatan institusi pariwisata di

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		kelemahan-ancaman saling melengkapi. Akibatnya, dengan menggunakan keempat strategi tersebut, pengembangan desa wisata dapat mengoptimalkan potensi desa yang ada dengan memanfaatkan sumber daya dan kelembagaan yang kuat. Selain itu, mereka dapat memperkuat kolaborasi dan jaringan dalam pengelolaan usaha pariwisata serta dalam pemasaran dan promosi untuk memastikan keberlanjutan di masa depan.	organisasi atau masyarakat sendiri.	juga penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, serta penampakan hasil. Dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini mengutamakan penggunaan kuesioner sebagai ciri penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif lebih diutamakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD). Dari aspek pencampuran sebagaimana menurut Creswell (2009), data kualitatif dan kuantitatif saling berhubungan selama tahap penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang disingkat SWOT.	tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat akan sangat penting. keberhasilan transformasi desa wisata menjadi area pariwisata yang didukung secara strategis oleh partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan perusahaan swasta. Tambahan pula, keberadaan Pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kelompok masyarakat yang sadar wisata karena tanggung jawab masyarakat untuk membangun desa wisata dimulai dengan keberadaan kelompok sadar wisata dari awal, perencanaan, implementasi, pengawasan, dan

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
					evaluasi dalam bisnis pariwisata desa.
3	<i>Circular economy and disruption in the value chain: The role of stakeholders and networks in startups, Jabour et.al, 2024</i>	Studi ini mengkaji peran pengembangan jejaring dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong adopsi ekonomi sirkular dan bagaimana hal itu berdampak pada disrupti rantai nilai startup yang didukung oleh Industri 4.0.	Sebuah tinjauan sistematis literatur telah dilakukan, dengan penekanan khusus pada artikel yang diterbitkan dari tahun 2008 hingga 2024, yang diperoleh dari basis data Science Direct, Scopus, dan Web of Science.	Sebanyak 101 artikel dimasukkan ke dalam portofolio bibliografis dan metode analisis isi digunakan. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting bagi startup untuk mengembangkan ekonomi sirkular dan mengembangkan model bisnis sirkular. Interaksi jejaring juga sangat penting untuk meningkatkan sirkularitas dan meningkatkan disrupti rantai nilai, terutama ketika datang ke pembuatan barang baru.	Dengan mengungkap hubungan antara berbagai jenis keterlibatan dan strategi yang digunakan oleh pemangku kepentingan—khususnya untuk startup yang lebih rentan—penelitian ini menambah kerangka teoretis. Temuan ini, dari sudut pandang manajemen, memberikan pengetahuan bermanfaat yang dapat membantu wirausahawan dalam proses pengambilan keputusan dan membantu mereka menciptakan dan menguji solusi sirkular di startup.

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
4	Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Serulingmas Interactive Zoo, Kabupaten Banjarnegara Anisa Rahmawati, Aufarul Marom, 2024	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta kontribusi para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Serulingmas Interactive Zoo, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendorong maupun penghambat yang dihadapi dalam proses pengembangannya.	Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan konsep analisis stakeholder (Reed dkk., 2009) yang meliputi identifikasi, klasifikasi, dan relasi antar pemangku kepentingan; teori peran stakeholder dari Nugroho (2015) yang membagi aktor menjadi peneliti, bisnis, pemerintah, masyarakat lokal, media, LSM, dan wisatawan; serta teori pengembangan pariwisata berdasarkan Perda Kabupaten Banjarnegara No. 14 Tahun 2016 yang mencakup aspek destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan, dengan analisis faktor pendorong dan penghambat melalui indikator nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan (Destiana dkk., 2020).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam pemilihan informan, sedangkan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber tertulis yang kemudian diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Serulingmas Interactive Zoo sudah cukup baik pada aspek pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata berkat peran aktif stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, media, LSM, dan wisatawan, namun masih terdapat kelemahan pada aspek destinasi terutama sarana prasarana akibat keterbatasan anggaran; selain itu, keterlibatan sektor swasta belum optimal sehingga diperlukan strategi kemitraan baru untuk mendukung pengembangan wisata.

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
5	Peran Stakeholder Pariwisata Dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik daya tarik dan atraksi wisata di Pulau Samalona, mengevaluasi kontribusi para pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan wisata, serta menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi, baik yang mendukung maupun yang menjadi hambatan, terhadap peran pemangku kepentingan dalam proses pengembangan tersebut.	Menggunakan teori Pengembangan desa wisata dimana dalam tujuan pengembangan destinasi wisata, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaannya, terdiri dari lima elemen utama (Suwantoro, 2004:19), yaitu: 1. Objek dan atraksi wisata 2. Fasilitas pendukung wisata 3. Sarana penunjang wisata 4. Pengelolaan atau infrastruktur 5. Komunitas atau lingkungan sekitar.	Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pulau Samalona. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta selama proses pengembangan.	Sebagai hasil dari penelitian, Pulau Samalona memiliki banyak daya tarik bahari, terutama untuk snorkeling. Pengembangannya melibatkan Disparekraf Kota Makassar, pelaku usaha, dan masyarakat lokal, dengan tugas mencakup penyediaan fasilitas, pelatihan SDM, pemberdayaan, promosi, dan CSR. Faktor pendukung adalah dukungan dari masyarakat lokal dan sektor swasta, sedangkan hambatan adalah peran Disparekraf yang belum optimal, kurangnya profesionalisme masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar stakeholder.

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
6	Community-based tourism: Opportunities and challenges a case study in Thanh Ha pottery village, Hoi An city, Vietnam Long Pham Hong et al., 2021	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prospek dan hambatan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di desa kerajinan gerabah Thanh Ha.	Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism/CBT) adalah dasar teoretis dari penelitian ini. Konsep ini menekankan pentingnya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam manajemen pariwisata dalam upaya mempertahankan budaya lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dianggap berhasil dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi efek negatif dari pariwisata massal, CBT menghadapi beberapa masalah, seperti kekurangan sumber daya manusia yang terampil, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan industri modern. Oleh karena itu, pengembangan CBT di desa wisata sangat bergantung pada dukungan	Studi ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Desa Thanh Ha, Hoi An, Vietnam. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 34 warga lokal, 3 operator tur, dan 4 otoritas pariwisata, serta analisis data sekunder dari jurnal dan laporan. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif untuk menentukan prospek, tantangan, dan peluang untuk pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) di desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Thanh Ha memiliki potensi besar untuk mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) karena sumber daya pariwisatanya yang kaya, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Namun, ada beberapa masalah yang muncul, seperti kekurangan tenaga kerja berkualitas tinggi, keterbatasan ruang produksi dan bahan baku, dan persaingan dengan produk industri canggih. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan CBT di desa tersebut, diperlukan

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
			pemerintah, organisasi internasional, dan partisipasi masyarakat.		strategi pengelolaan yang lebih baik serta inisiatif peningkatan kapasitas.
7	Collaborative Governance: Synergicity Among the Local Government, Higher Education, and Community in Empowerment of Communities and Management of Potential Tourism Village (Case Study in the Umaurip Ecotourism Area, Timpag Village, Tabanan Bali)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah daerah, institusi pendidikan tinggi, dan masyarakat bekerja sama untuk memberdayakan komunitas lokal dan mengelola potensi desa wisata. Selain itu, penelitian ini menganalisis bagaimana kerja sama antara ketiga komponen ini dapat menghasilkan sistem tata kelola desa wisata yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan.	Penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) dan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism/CBT). Konsep-konsep ini menekankan betapa pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga akademik, dan masyarakat untuk mengelola desa wisata secara berkelanjutan. Universitas bertindak sebagai pusat pendidikan dan intelektual, pemerintah bertindak sebagai pengaturan dan fasilitator, dan masyarakat bertindak sebagai pengendali utama yang memastikan keseimbangan lingkungan dan	Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan di Kawasan Ekowisata Umaurip di Desa Timpag, Tabanan, Bali, melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat lokal, serta analisis dokumen dari berbagai sumber yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana semua pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengelola desa wisata.	Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat penting untuk mengelola desa wisata Umaurip. Pemerintah berfungsi sebagai pengaturan dan fasilitator, perguruan tinggi membantu dengan penelitian dan kapasitas, dan masyarakat berfungsi sebagai pengelola utama yang menjaga keberlanjutan ekowisata. Namun, masalah seperti koordinasi antar pemangku kepentingan yang buruk, kekurangan sumber daya manusia

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	(Aryawan et al., 2019)	Penelitian ini juga menemukan masalah dan prospek dalam pembangunan ekowisata berbasis masyarakat, terutama di Kawasan Ekowisata Umaurip, Desa Timpag, Tabanan, Bali.	budaya. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk menghasilkan sistem tata kelola desa wisata yang inovatif, berkelanjutan, dan melibatkan semua orang.		yang terampil, dan keterbatasan infrastruktur masih ada. Akibatnya, diperlukan pendekatan yang lebih efisien untuk meningkatkan sinergi dan memastikan keberlanjutan desa wisata tersebut.
8	The Effect Of Community Participation And Role Of Regional Government And Private Sector Towards The Success Of Tourism Village: A Case Study In Ambengan Village As A Tourism Village In Sukasada District	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta terhadap keberhasilan pengembangan desa wisata. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi peran langsung dan tidak langsung pemerintah	Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community-Based Tourism/CBT) adalah dasar teoretis dari penelitian ini. CBT menekankan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, serta peran pemerintah dan keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan desa wisata. Sektor swasta mendukung desa wisata dengan investasi, pelatihan, dan promosi,	Metode kuantitatif, analisis Partial Least Square (PLS), digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki hubungan antara partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam keberhasilan pengembangan desa wisata. Data dikumpulkan dari masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan bisnis pariwisata di Desa Ambengan, Buleleng. Untuk memastikan hubungan antar	Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, dan sektor swasta memiliki efek positif dan signifikan terhadap keberhasilan desa wisata. Baik secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah membantu pertumbuhan pariwisata melalui partisipasi sektor swasta dan publik.

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
	Of Buleleng Regency, Indonesia. (Suwaryanthi et al., 2019)	daerah dalam pengembangan pariwisata melalui keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.	sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.	variabel yang diteliti, pengujian data termasuk uji validitas dan reliabilitas serta analisis struktural (inner model) dan pengukuran (outer model).	Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, masalah seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia harus diatasi.
9	Tourism Village Development: Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development Fafurida et al., 2023	Menggunakan pendekatan spasial, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, mereka menganalisis perbedaan antara desa wisata dan desa non- wisata dalam hal daya tarik, aksesibilitas, dan amenitas. Selain itu,	Penelitian ini berfokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan; peran aksesibilitas, amenitas, dan daya tarik dalam pertumbuhan pariwisata; dan dampak pariwisata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan pengaruh desa wisata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penelitian ini, metode campuran (mixed-method) digunakan, yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk memetakan sebaran desa wisata, uji Mann-Whitney U untuk membandingkan desa wisata dan desa non-wisata, dan analisis Partial Least Square (PLS) digunakan untuk melihat bagaimana daya tarik,	Studi menunjukkan bahwa desa wisata meningkatkan daya tarik, amenitas, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Karena pembangunan infrastruktur yang hampir sama, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal aksesibilitas antara desa wisata dan desa non- wisata. Selain itu, desa

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		penelitian ini menyelidiki pengaruh komponen tersebut terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Indeks Desa Membangun (IDM) desa, dengan status desa wisata sebagai variabel moderasi.	(SDGs) dan Indeks Desa Membangun (IDM).	aksesibilitas, dan amenitas memengaruhi pencapaian SDGs dan IDM. Data ini diperoleh dari 8.562 desa di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 8.178 desa non-wisata dan 384 desa wisata.	wisata belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) karena pembentukan IDM dipengaruhi oleh komponen sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas.
10	<i>The Role of Stakeholders in Agro-Tourism Development with MAXTOR Analysis Approach (Case Study in Catur Tourism Village of Bali Province, Indonesia)</i> Gede Aryawan et al., 2019	Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agrowisata di Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan untuk menganalisis peran masing-masing	Teori pemangku kepentingan dan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism/CBT) adalah dasar teoretis dari penelitian ini. Teori pemangku kepentingan menekankan peran berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, petani, sektor swasta, dan lembaga pariwisata, dalam menjamin pengembangan ekonomi dan	Analisis MACTOR (Matrix of Alliance and Conflict: Tactic, Objectives, and Recommendations) digunakan untuk menentukan pemangku kepentingan penting dalam pengembangan agrowisata Desa Catur. Pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan masyarakat lokal, petani, pejabat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal, petani, pemerintah, bisnis swasta, dan lembaga pariwisata adalah pemangku kepentingan utama dalam pembangunan agrowisata Desa Catur. Sementara lembaga pariwisata lokal adalah pihak yang paling bergantung pada pihak

No	Peneliti/ Tahun/ Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
		pemangku kepentingan serta hubungan mereka satu sama lain. Menggunakan pendekatan analisis MACTOR (Matrix of Alliance and Conflict: Tactic, Objectives, and Recommendation), penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan agrowisata dan pemberdayaannya.	mempromosikan budaya lokal. Agrowisata menggabungkan kegiatan pertanian dengan pariwisata untuk menghasilkan manfaat ekonomi.	pemerintah, perwakilan sektor swasta, dan lembaga pariwisata.	lain, pemerintah memiliki kekuatan terbesar. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata yang berkelanjutan membutuhkan peningkatan infrastruktur, kolaborasi antar pemangku kepentingan, pelatihan dan bantuan akademisi.

Sumber : Diolah dan dianalisis dari berbagai Artikel Jurnal oleh Peneliti, Tahun 2025

Penelitian oleh Whenzeng et al. (2024) menganalisis dampak investasi pemerintah dan tingkat komersialisasi terhadap pengembangan pariwisata berkualitas tinggi serta peran inovasi teknologi sebagai perantara dalam hubungan tersebut dengan menggunakan analisis empiris berdasarkan data panel provinsi dari 2012 hingga 2022, yang mencakup variabel utama seperti pengembangan pariwisata berkualitas tinggi sebagai variabel dependen, investasi pemerintah dan tingkat komersialisasi sebagai variabel independen, serta inovasi teknologi dan struktur industri sebagai variabel mediasi, sementara pengujian dilakukan dengan model regresi panel serta diuji menggunakan robustness test dan endogeneity test untuk memastikan kestabilan hasil yang menunjukkan bahwa investasi pemerintah dan tingkat komersialisasi memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan pariwisata berkualitas tinggi, dengan inovasi teknologi yang berperan sebagai perantara dalam hubungan antara investasi pemerintah dan pariwisata serta struktur industri yang menjadi faktor perantara antara komersialisasi dan pertumbuhan sektor pariwisata, sehingga penelitian ini menegaskan bahwa investasi strategis dan lingkungan pasar yang kompetitif dapat mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

Penelitian oleh Arintoko et al. (2020) bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan desa wisata di kawasan Borobudur dengan menggunakan pendekatan collaborative governance, yang menekankan kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan kebijakan publik, dengan metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta penyebaran kuesioner,

sementara analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan desa wisata, yang hasilnya menunjukkan bahwa strategi utama dalam pengembangan desa wisata berfokus pada penguatan institusi pariwisata di berbagai tingkatan pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan sektor swasta, di mana keberhasilan transformasi desa wisata sangat bergantung pada keterlibatan kelompok masyarakat sadar wisata dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan usaha pariwisata di kawasan Borobudur.

Penelitian oleh Jabour et al. (2024) bertujuan untuk mengeksplorasi peran keterlibatan pemangku kepentingan dan pengembangan jaringan dalam mendukung adopsi ekonomi sirkular serta dampaknya terhadap gangguan dalam rantai nilai startup yang didukung oleh teknologi Industri 4.0, dengan menggunakan metode tinjauan sistematis literatur dari artikel yang diterbitkan antara 2008 hingga 2024 yang diperoleh dari database Scopus, Web of Science, dan ScienceDirect, serta menganalisis 101 artikel yang termasuk dalam portofolio bibliografi menggunakan metodologi analisis konten, yang hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting bagi startup dalam mengembangkan model bisnis sirkular dan mendukung ekonomi sirkular, sementara interaksi jaringan memainkan peran utama dalam meningkatkan sirkularitas serta mendorong gangguan dalam rantai nilai, terutama dalam pengembangan produk baru, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengungkap hubungan antara berbagai bentuk keterlibatan dan strategi yang digunakan oleh pemangku

kepentingan, serta memberikan wawasan bagi pengusaha dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan penciptaan dan pengujian solusi sirkular dalam startup.

Penelitian oleh Rahmawati.A. 2024, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran serta kontribusi stakeholder dalam pengembangan Serulingmas Interactive Zoo sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui purposive dan snowball sampling, data dikumpulkan lewat wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian diuji validitasnya dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Serulingmas Interactive Zoo telah berjalan baik pada aspek pemasaran, industri, dan kelembagaan berkat peran aktif pemerintah, masyarakat lokal, media, LSM, dan wisatawan, namun masih terkendala pada aspek destinasi akibat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan sektor swasta, sehingga diperlukan strategi kemitraan baru untuk memperkuat dukungan dan percepatan pengembangan wisata.

Penelitian oleh Amalyah et al. (2016) bertujuan untuk menggambarkan karakteristik daya tarik wisata di Pulau Samalona, mengevaluasi kontribusi pemangku kepentingan dalam pengembangannya, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut dengan menggunakan teori pengembangan desa wisata yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pengelolaan yang terdiri dari objek dan atraksi wisata, fasilitas pendukung, sarana penunjang, infrastruktur, serta komunitas lokal,

sementara metode deskriptif kualitatif diterapkan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang hasilnya menunjukkan bahwa Pulau Samalona memiliki daya tarik wisata bahari, terutama untuk snorkeling, dengan pengembangannya melibatkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, pelaku usaha, serta masyarakat lokal dalam penyediaan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, pemberdayaan, promosi, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sementara faktor pendukung utama adalah keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, sedangkan kendala yang dihadapi meliputi peran Disparekraf yang belum optimal, kurangnya profesionalisme masyarakat, serta minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga penelitian ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang lebih baik untuk memastikan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Samalona.

Penelitian oleh Long Pham Hong et al. (2021) bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan Community-Based Tourism (CBT) di Desa Thanh Ha, Vietnam, dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif melalui observasi langsung, wawancara dengan 34 penduduk lokal, 3 operator tur, dan 4 otoritas pariwisata, serta analisis data sekunder dari jurnal dan laporan terkait, yang hasilnya menunjukkan bahwa Desa Thanh Ha memiliki potensi besar untuk pengembangan CBT berkat keberagaman sumber daya wisata, dukungan pemerintah, dan keterlibatan aktif masyarakat, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya tenaga kerja terampil, keterbatasan ruang produksi dan bahan baku, serta persaingan dengan produk industri modern,

sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih baik serta peningkatan kapasitas masyarakat guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan CBT di desa tersebut.

Penelitian oleh A.A. Gede Oka Wisnumurti et al. (2019) bertujuan untuk menganalisis peran kolaboratif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pemberdayaan komunitas serta pengelolaan potensi desa wisata di Kawasan Ekowisata Umaurip, Desa Timpag, Tabanan, Bali, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal, serta analisis dokumen dari berbagai sumber terkait, yang hasilnya menunjukkan bahwa sinergi antara ketiga elemen tersebut berperan penting dalam menciptakan sistem tata kelola desa wisata yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan, di mana pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai agen intelektual yang mendukung riset dan peningkatan kapasitas, serta masyarakat sebagai pengelola utama yang menjaga keberlanjutan ekowisata, namun masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia terampil, serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

Penelitian oleh Suwaryanthi Luh Meylin et al. (2019) bertujuan untuk menganalisis dampak partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, dan sektor swasta terhadap keberhasilan pengembangan desa wisata di Desa Ambengan,

Buleleng, dengan menggunakan metode kuantitatif melalui analisis Partial Least Square (PLS) serta pengumpulan data melalui survei dan kuesioner yang melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha pariwisata, yang hasilnya menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan desa wisata, di mana pemerintah memainkan peran langsung dan tidak langsung dalam pengembangan pariwisata melalui keterlibatan masyarakat dan sektor swasta, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan desa wisata.

Penelitian oleh Fafurida et al. (2023) bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan spasial serta menganalisis perbedaan antara desa wisata dan non-desa wisata berdasarkan daya tarik, aksesibilitas, dan amenitas, dengan menggunakan metode mixed-method yang menggabungkan analisis kuantitatif melalui Geographic Information System (GIS), uji Mann-Whitney U, serta analisis Partial Least Square (PLS), sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk mendukung interpretasi data dan analisis kontekstual, yang hasilnya menunjukkan bahwa desa wisata berkontribusi positif terhadap peningkatan daya tarik dan fasilitas wisata, namun tidak terdapat perbedaan signifikan dalam aspek aksesibilitas karena pembangunan infrastruktur yang relatif merata, serta bahwa status desa wisata belum memberikan dampak signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) karena perkembangannya juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas.

Penelitian oleh Gede Aryawan et al. (2019) bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pengembangan agrowisata di Desa Catur, Kintamani, Bangli, serta menganalisis peran dan hubungan antar pemangku kepentingan menggunakan pendekatan MACTOR (Matrix of Alliance and Conflict: Tactic, Objectives, and Recommendation), dengan metode kualitatif eksploratif melalui Focus Group Discussions (FGD) dan wawancara dengan masyarakat lokal, petani, pemerintah, sektor swasta, serta institusi pariwisata, yang hasilnya menunjukkan bahwa pemangku kepentingan utama dalam pengembangan agrowisata mencakup masyarakat, petani, pemerintah, sektor swasta, dan institusi pariwisata, di mana pemerintah memiliki peran paling berpengaruh sementara institusi pariwisata paling bergantung pada pihak lain, serta menekankan pentingnya penguatan infrastruktur, peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta dukungan pelatihan dan pendampingan akademisi untuk memastikan pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini membawa beberapa pembaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang membahas peran *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata. Salah satu aspek pembaruannya adalah fokus lokasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan dan metode yang lebih komprehensif dengan teori peran stakeholder, kendala yang dihadapi, serta aspek pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata, sehingga data yang dihasilkan lebih relevan dan akurat. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mendiskripsikan peran *stakeholders* yang lebih detail tidak hanya salah satunya namun secara menyeluruh baik pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakatnya,

tidak hanya sekadar mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga melihat kontribusi masing-masing *stakeholders*, serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Pembaruan lain yang ditawarkan adalah pemanfaatan data terkini, di mana penelitian ini menggunakan informasi terbaru sehingga mampu memberikan gambaran aktual mengenai pengelolaan desa wisata di Desa Berjo, termasuk perubahan tren, kebijakan, serta dinamika sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangannya.

1.5.2 Administrasi Publik

Secara etimologi dalam Bahasa Indonesia, administrasi dalam Bahasa Inggris yaitu *administration* yang berarti melayani, memenu dan melayani. Menurut (Meutia, 2017), *administration* sendiri bermakna pemberian bantuan, perwujudan, pimpinan dan juga perintah. Sedangkan pada kata publik yang berasal dari Bahasa Inggris “public” berarti masyarakat, umum, atau negara. Administrasi publik adalah cabang ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi publik, berbeda dengan manajemen yang lebih berfokus pada organisasi swasta. Administrasi publik mencakup kajian tentang organisasi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan, serta isu-isu seperti birokrasi, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan kebijakan publik, termasuk proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Sebagai bagian dari ilmu sosial, administrasi publik juga menyoroti tiga pilar utama pemerintahan legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang terkait dengan masyarakat secara

luas, seperti pengelolaan pemerintahan, pembangunan administrasi, tujuan negara, dan prinsip etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa definisi administrasi public menurut para ahli antara lain ;

- a. Chandler dan Plano (Sellang, 2016) menyatakan bahwa administrasi public adalah suatu cara dimana sumber daya dan personel public diorganisasi serta di koordinasi untuk memformulasikan, melaksanakan dan juga mengelola (manage) berbagai keputusan dalam kebijakan publik.
- b. Felix A. Nigro dan Lloyd G Nigro dalam (Meuti, 2017) mendefinisikan administrasi public menjadi beberapa pengertian anatranya ;
 1. Administrasi public mencakup sekumpulan orang dalam ruangan lingkup pemerintah,
 2. Administrasi Publik terdiri dari tiga cabang dalam pemerintah antara lain badan eksekutif, legislative dan juga yudikatif. Hubungan antara ketiga cabang tersebut,
 3. Administrasi publik memegang peran penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, karena merupakan bagian dari suatu proses politik,
 4. Administrasi publik berkaitan erat dengan beraneka ragam kelompok baik swasta maupun perseorangan dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat,
 5. Administrasi publik berbeda pada penempatan pandangan dengan administrasi perseorangan dalam beberapa hal.

- c. Herbert A. Simon, Donal W. Smithurg & Victor A. Thomson, (1970) dalam (Abdul Kadir, 2020) *“By public administration is meant, in common usage the acitivities of executive branches of national, state, and local government; independent boards and commisions set up by congress and state legislatures: government corportions; and certain other agencies of a specialized character. Specifically excluded are yudicial and legislative agencies within the government administration”*. (Administrasi publik merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang eksekutif pemerintahan di tingkat negara, negara bagian, dan daerah, termasuk aktivitas badan dan komisi yang dibentuk oleh kongres serta berdasarkan undang-undang negara bagian. Ini juga mencakup kegiatan perusahaan milik negara dan layanan khusus lainnya. Namun, dalam konteks ini, layanan yang berhubungan dengan yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam administrasi pemerintahan.).
- d. Pfiffner & Presthus (1960) dalam (Abdul Kadir, 2020) *“Publik Administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out publik policy”*. (Administrasi publik dapat diartikan sebagai upaya koordinasi antara individu atau kelompok dalam melaksanakan kebijakan publik.
- e. Rosenbloom and Goldavan (1989) dalam (Abdul Kadir, 2020) *“Public administration is the use of managerial political, and legal theories and processes to fulfill legislative, and judicial governmental mandates for the provision of regulatory and service functions for the society as whole or for*

some segment of its.” (Administrasi publik merujuk pada penerapan kepemimpinan politik dan berbagai proses serta teori yang sah untuk melaksanakan tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam menyediakan regulasi untuk pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan atau sebagian).

- f. Levine, Peters, and Thomson (1990) dalam (Abdul Kadir, 2020) “*Public administration is centrally concerned with the organization of government policies and programme as well as the behavior of officials (usually non elected) formally responsible for their conduct.*” (Administrasi publik fokus pada kebijakan dan program yang dijalankan oleh organisasi pemerintah, serta perhatian pada tindakan pejabat-pejabat yang umumnya tidak dipilih, yang secara resmi bertanggung jawab atas tindakannya).

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Pada buku edisi ketiga (Keban tahun 2014), menyatakan beberapa pergeseran paradigma administrasi public antara lain ;

Paradigma I, yang dikenal sebagai Dikotomi Administrasi Politik (1900 1926), bertujuan untuk secara tegas memisahkan peran politik dari peran administratif dalam pemerintahan sebagai langkah untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas pada proses keberjalanan pemerintahan. Dalam kerangka paradigma ini, terdapat dorongan untuk mendasarkan praktik administrasi atau manajemen pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterapkan dalam kedua sektor, baik publik maupun swasta. Woodrow 26 Wilson diakui sebagai inisiator utama paradigma ini

melalui artikelnya yang terkenal pada tahun 1897. Wilson mengidentifikasi empat persyaratan utama untuk mencapai administrasi publik yang efektif:

1. Pemisahan Politik dan Administrasi, Pemisahan yang tegas antara fungsi politik, yang melibatkan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan fungsi administrasi, yang melibatkan pelaksanaan kebijakan dan manajemen operasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari campur tangan politik dalam operasi administratif yang dapat mengganggu efisiensi.
2. Analisis Komparatif Organisasi Politik dan Swasta, Paradigma ini mendorong pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana organisasi pemerintah dapat memanfaatkan praktik-praktik dari sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka.
3. Meningkatkan Efisiensi dengan Praktik Bisnis dan Sikap Bisnis, Administrasi publik harus mengadopsi praktik bisnis dan sikap yang lebih fokus pada hasil dan efisiensi, mirip dengan pendekatan bisnis, untuk meningkatkan operasi sehari-hari dan pengelolaan sumber daya.
4. Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik, Paradigma ini mendorong penggunaan manajemen yang lebih baik dan pelatihan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Selain itu, pendekatan ini mendorong penilaian berbasis prestasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.

Hasil dari paradigma ini adalah pemahaman yang lebih tajam tentang pemisahan antara urusan politik dan juga administrasi, dan juga mengaitkannya pada pemisahan antara nilai dan fakta. Paradigma ini mempunyai tujuan untuk

menciptakan tatanan administratif lebih efisien serta profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan fokus pada pencapaian tujuan yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Paradigma II, Prinsip - Prinsip Administrasi (1927-1937), Paradigma prinsip-prinsip administrasi publik pada periode 1927-1937 adalah pendekatan yang menekankan bahwa administrasi publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang berlaku di berbagai lingkungan sosial budaya dan organisasi. Fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip administrasi yang dapat diterapkan di mana pun, tanpa terlalu memperhatikan aspek lingkungan khusus. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi memiliki kejelasan dalam prinsip-prinsipnya, yang berarti bahwa prinsip-prinsip administrasi publik dapat digunakan oleh negara manapun, meskipun memiliki perbedaan dalam lingkungan, visi, budaya, dan faktor-faktor lain.

Salah satu sumbangan terkemuka dari periode ini adalah konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting), yang diperkenalkan oleh Luther Gulick dan Lyndall Urwick. Konsep ini merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengorganisasi kegiatan dalam administrasi publik. Melalui konsep ini, mereka menyediakan panduan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dengan efisien dan efektif. Jadi, pada paradigma ini, fokus utamanya adalah pada prinsip-prinsip administrasi yang dapat diterapkan di berbagai konteks, dan konsep seperti POSDCORB menjadi pedoman untuk merancang dan menjalankan tugas tugas administratif dalam pemerintahan.

Paradigma III, Pada paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik yang berlangsung antara tahun 1950 hingga 1970, disiplin Administrasi Publik kembali mendapatkan perhatian utama dalam ilmu politik. Meskipun demikian, fokusnya mulai kabur dan terjadi upaya untuk mendefinisikan ulang hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi publik. Paradigma ini dapat dibagi menjadi dua urutan peristiwa yang mencerminkan isu-isu yang berbeda dalam hubungan tegang antara para ahli administrasi dan ahli politik:

1. Penggunaan Studi Kasus yang Lebih Luas, Pada periode ini, digunakan pendekatan studi kasus yang lebih luas sebagai alat epistemologis. Hal ini berarti penelitian lebih fokus pada analisis kasus-kasus konkret dalam administrasi publik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Studi kasus digunakan untuk memahami isu-isu kompleks yang muncul dalam lingkungan administrasi pemerintahan.
2. Pembandingan dan Perkembangan Administrasi, Paradigma ini juga mencakup pemikiran tentang perbandingan antara praktik administrasi publik di berbagai negara dan perkembangan dalam administrasi itu sendiri. Upaya untuk membandingkan dan mengevaluasi praktik administratif di berbagai konteks nasional dan internasional membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang berbagai pendekatan administratif yang efektif.

Pada periode ini, Administrasi Publik kembali mendapatkan perhatian dalam ilmu politik, tetapi seiring berjalannya waktu, fokusnya menjadi lebih kabur dan ada upaya untuk menggambarkan kembali hubungan antara ilmu politik dan administrasi. Selain itu, digunakan metode studi kasus yang lebih luas dan

perbandingan untuk membantu mengatasi isu-isu kompleks dalam administrasi publik dan untuk memahami perkembangan dalam disiplin ini.

Paradigma IV, Administrasi Publik sebagai manajemen (1956-1970), Henry (1975) berpendapat paradigma ke-4 dalam perkembangan ilmu administrasi publik merujuk pada pemahaman administrasi publik sebagai manajemen, yang berlangsung dari tahun 1956 hingga 1970. Pada periode ini, terdapat kesamaan dengan bukti ke-3, yang menunjukkan bahwa perkembangan ini tidak selalu menguntungkan ilmu politik, karena beberapa sarjana lebih fokus pada konsep manajemen dalam administrasi publik. Pada tahap 3 dan 4 ini, dua disiplin ilmu yang bersaing dalam pemahaman administrasi publik hampir tidak mengalami perubahan yang signifikan dan lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan studi-studi baru yang diakui, yang menjadi fokus para sarjana pionir. Namun, Henry (1975) menyoroti bahwa disiplin ini harus tetap bertahan melawan kritik ini, karena paradigma berikutnya menggambarkan administrasi publik sebagai administrasi publik itu sendiri, atau sebagai manajemen publik, yang berlangsung dari tahun 1970 hingga 1990.

Paradigma V, Paradigma V dalam bidang Administrasi Publik, yang berkembang sejak tahun 1970 hingga saat ini, menandai perubahan signifikan dalam pemahaman dan praktik administrasi publik. Pada era ini, terdapat upaya untuk mengembangkan kembali disiplin ilmu administrasi publik sebagai bidang studi yang mandiri. Namun, pergeseran perhatian dari hierarki birokrasi ke pasar dan organisasi sektor swasta mencerminkan peralihan dari model administrasi publik tradisional ke model New Public Management (NPM). Perubahan ini,

sejalan dengan pandangan Peters (2003), dianggap sebagai perubahan paradigma yang penting, meskipun perubahan ini tidak mengikuti perkembangan tahapan paradigma yang telah diakui oleh Henry (1975). Perubahan tersebut melibatkan tiga aliran utama, yaitu paradigma Konvensional atau Tradisional, paradigma NPM, dan paradigma Tata Kelola.

NPM muncul sebagai respons terhadap masalah ketidakefisienan dalam sistem administrasi publik. Pendekatan ini didasarkan pada penggabungan teori ekonomi dan teknik manajemen yang umumnya digunakan dalam sektor swasta. Ide dasar di balik NPM adalah fokus pada pengurangan peran negara dalam administrasi publik. Asumsi-asumsi yang sebelumnya terkait dengan administrasi publik tradisional, seperti keyakinan bahwa struktur birokrasi Weberian adalah yang paling sesuai untuk administrasi yang efektif, semuanya bertentangan dengan pandangan paradigma NPM ini.

Paradigma VI, Paradigma VI, Tata Kelola (1990-Sekarang) Dalam konteks ini, pelaksanaan kekuasaan oleh pemimpin politik untuk kepentingan kesejahteraan warga negara atau rakyat dapat didefinisikan sebagai suatu proses kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memiliki pengaruh dan peran dalam penetapan serta pengumuman kebijakan publik yang memiliki dampak langsung pada aspek-aspek kemanusiaan, interaksi sosial, dan perkembangan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). Dalam tahap perkembangan administrasi publik yang telah dijelaskan oleh Henry (1975), terdapat beberapa poin penting yang perlu ditekankan:

1. Paradigma Tata Kelola (Governance) muncul setelah tahun 1990, namun tidak selalu jelas kapan tepatnya paradigma ini muncul dalam kronologi yang disajikan oleh Henry.
2. Beberapa orang melihat paradigma Tata Kelola sebagai bagian dari NPM, yang menunjukkan adanya kesamaan dan saling melengkapi antara keduanya.
3. Sementara paradigma Tata Kelola dan NPM memiliki akar dan konsep yang serupa, keduanya berasal dari ideologi neoliberal yang dianut oleh banyak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik memiliki peran yang sangat penting dalam Administrasi Negara ataupun Administrasi Publik. Pemahaman tentang manajemen publik membantu dalam memahami posisinya dalam struktur pemerintahan. Secara umum, manajemen publik didefinisikan sebagai penerapan berbagai model, teori, teknik, metode, dan strategi dalam meraih tujuan dengan efisiensi dan efektivitas. Definisi manajemen publik sangat bervariasi, bergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan perspektif mereka. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli ; Shafritz dan Russel (2008), dalam buku yang dikutip oleh Firdausijah et al. (2023), mengartikan Manajemen publik sebagai proses pengelolaan organisasi dengan fokus pada tanggung jawab, menggunakan sumber daya manusia dan teknologi (mesin) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa manajemen publik berfokus pada pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi.

Donovan dan Jackson (1991), dalam buku yang dikutip oleh Firdausijah et al. (2023), menyatakan manajemen publik dapat diartikan serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan keterampilan tertentu. Nor Ghofur (2014), dalam karyanya yang dikutip oleh Firdausijah et al. (2023), menjelaskan manajemen publik merujuk pada manajemen pemerintah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pelayanan masyarakat. Overman (1984), dalam buku yang dikutip oleh Firdausijah et al. (2023), menyatakan manajemen publik sebagai studi interdisipliner dalam organisasi yang menggabungkan berbagai fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Samuel E. Overman (2008), yang dikutip dalam buku Firdausijah et al. (2023), berpendapat bahwa manajemen publik merupakan kajian yang menggabungkan berbagai aspek umum organisasi, yang mengintegrasikan proses manajerial (seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian) yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, informasi, serta elemen politik. J. Steven Ott, Albert C. Hyde, dan Jay M. Shafritz (2017), dalam buku *Public Management: Essential Readings*, mengungkapkan bahwa manajemen publik seharusnya dipahami sebagai sebuah profesi, dengan penekanan pada peran manajer publik sebagai praktisi. Mereka berpendapat bahwa manajemen publik lebih memusatkan perhatian pada operasi organisasi pemerintahan atau lembaga non-profit, dibandingkan pada interaksi dengan badan legislatif, lembaga peradilan, atau sektor publik lainnya.

Pandangan Overman, dapat disimpulkan Manajemen Publik dan Kebijakan Publik merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berhubungan. Kebijakan Publik diibaratkan sebagai pusat kendali dan pengatur arah (sistem saraf dan otak), sedangkan Manajemen Publik berperan sebagai penggerak operasional (sistem jantung dan peredaran darah). Peran utama Manajemen Publik adalah mengelola berbagai sumber daya, baik yang bersifat manusia maupun non-manusia, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Manajemen Publik melibatkan fungsi manajerial misalnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang diimplementasikan dalam sektor publik dan organisasi nonprofit. Karena itu, Manajemen Publik sering juga disebut sebagai Manajemen Pelayanan Publik. Secara keseluruhan, Manajemen Publik adalah bidang ilmu menggabungkan prinsip-prinsip manajemen dengan pemanfaatan sumber daya, seperti sumber daya manusia, keuangan, sumber daya material, pengetahuan, dan aspirasi masyarakat, guna mencapai sebuah tujuan dari organisasi.

1.5.5 Stakeholder

Stakeholder mencakup semua pihak, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi, yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini mencakup pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar, komunitas internasional, dan berbagai lembaga di luar perusahaan. Pihak-pihak ini dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (2014) dalam (Sera.S. 2018). Teori *stakeholder* yang disampaikan oleh Ghazali dan Chariri (2007), yang juga dikutip oleh Purwanto (2011) dalam (Sera.S. 2018), perusahaan bukan lagi entitas yang

hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham (*stakeholder*). Peran perusahaan kini meluas, di mana perusahaan juga harus memberikan manfaat yang signifikan bagi para *stakeholder* nya.

Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma, dari keuntungan ekonomi semata menuju kontribusi sosial yang lebih luas. Robert (1992), seperti yang dikutip dalam Nur dan Priantinah (2012) dan dikemukakan dalam (Sera.S. 2018), menegaskan bahwa pengungkapan sosial perusahaan merupakan kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan *stakeholder*. Teori *stakeholder* ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk manfaat tersebut adalah melalui implementasi Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan.

Maryono et al., 2015 dalam Nadhif.I.N 2024, identifikasi *stakeholder* :

1. *Stakeholder* Primer

Stakeholder primer merujuk pada pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap suatu kebijakan atau program, maupun kegiatan. Keberadaan dari adanya *stakeholder* primer dapat berperan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. *Stakeholder* primer yaitu sekelompok orang yang mendapatkan pengaruh secara langsung dari pelaksana kebijakan, baik itu positif maupun negatif.

2. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder utama merujuk pada pihak yang memiliki tanggung jawab hukum sekaligus kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait implementasi sebuah kebijakan.

3. *Stakeholder* Sekunder

Pihak pendukung atau *stakeholder* sekunder adalah kelompok yang tidak berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan suatu rencana atau tugas, atau kegiatan tertentu, serta tidak mempunyai kepentingan utama terhadap kebijakan tersebut. *Stakeholder* sekunder memiliki rasa kepedulian yang besar pada pengembangan program sehingga mereka ikut dalam memberikan masukan dan pengaruhnya dalam proses pengembangan tersebut. Keberadaan *stakeholder* sekunder dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

1.5.6 Peran *Stakeholder*

Peran seringkali dikaitkan dengan pemain, perilaku atau tindakan dan juga tanggung jawab. Suhardono pada kutipan (Hia. 2019) dalam (Nadhif.N.I 2024), teori peran berbicara mengenai kesatuan dari beberapa teori maupun orientasi ilmu dimana peran merupakan karakteristik yang di bawa oleh *stakeholders* ketidak menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Pengertian ini, berarti konsep peran menurut Suhardono lebih ditekankan pada posisi yang kemudian istilah posisi ini dikaitkan dengan *status*, *niche* dan *office*. Peran *stakeholder* dapat dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan juga tingkat kepentingannya (*interest*) yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* (Thompson dalam Sandy,2020)

yang dikutip dalam Alifisyiam,F.N.2024). Tingkat kepentingan dapat dilihat berdasarkan harapan dan juga aspirasi dari para pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan. Sedangkan tingkat pengaruh *stakeholders* sendiri dapat diukur atau dilihat dengan kemampuan mempengaruhi yang dimiliki *stakeholders* baik secara personal maupun dengan kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholders*, serta adanya kontribusi baik fisik maupun anggaran yang diberikan *stakeholders* dalam pelaksanaan program ataupun sebuah kebijakan.

Nugroho, et al., (2014), menyatakan *stakeholder* dalam program pengembangan, *stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan perannya;

1. *Policy Creator*, yaitu *stakeholders* mempunyai peranan menjadi penentu kebijakan dan juga pengambil keputusan.
2. Koordinator, *stakeholder* yang mempunyai peran untuk mengelola koordinasi *stakeholders* lainnya tersebut yang berperan atau terlibat dalam suatu program pembangunan.
3. Fasilitator, *Stakeholders* yang mempunyai peran untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok sasaran.
4. Implementor, *stakeholders* yang melaksanakan kebijakan terdiri atas kelompok yang menjadi sasaran.
5. Akselerator, *stakeholders* yang mempunyai peran untuk percepatan dan kontribusi bagi program agar dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

1.5.7 Pengembangan Desa Wisata

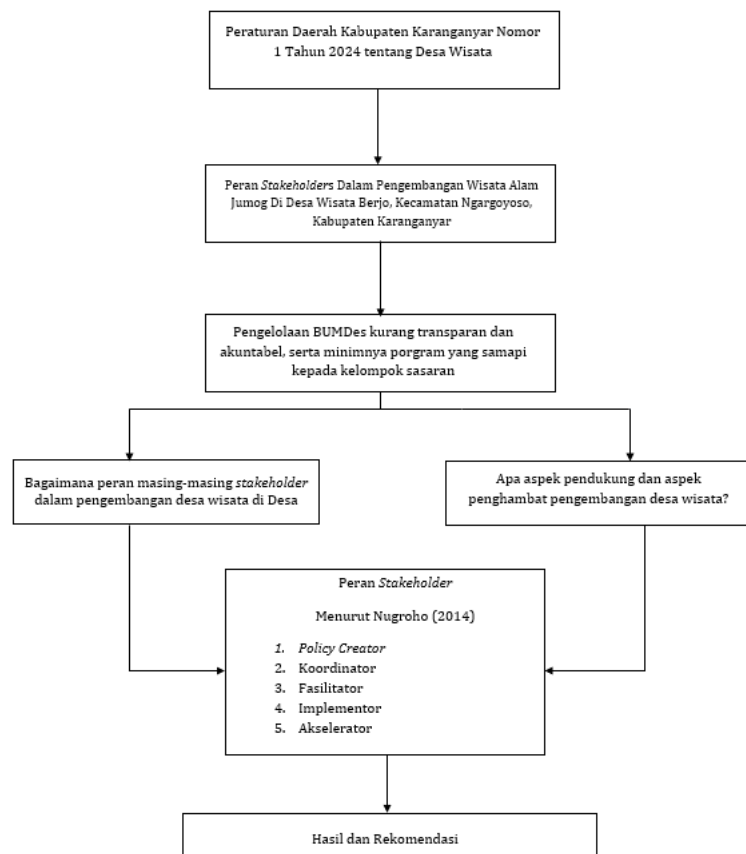
Desa wisata dan pariwisata desa memiliki perbedaan mendasar dalam konsep dan pengertiannya. Desa wisata mengacu pada konsep yang lebih spesifik dibandingkan wisata desa. Wisata desa merujuk pada aktivitas pariwisata yang dilakukan oleh individu atau kelompok di wilayah pedesaan, tanpa keharusan untuk terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat desa. Artinya, wisata desa lebih bersifat umum dan fleksibel, di mana kegiatan wisatanya tidak selalu berkaitan dengan nilai-nilai pedesaan.

Sebaliknya, desa wisata memiliki makna yang lebih mendalam dan khas. Hadiwijoyo (dalam Zwenli., 2019) menyatakan bahwa desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang menggambarkan keaslian desa melalui berbagai aspek, seperti kehidupan ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, dan aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Desa wisata juga memiliki tata ruang yang menarik dan khas, sehingga menjadi daya tarik yang unik bagi pengembangan sebuah wisata berbasis lokal. desa wisata tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang autentik, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan ekonomi lokal melalui pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat. Desa wisata menjadi wadah untuk memperkenalkan keunikan pedesaan sekaligus mendorong keberlanjutan pariwisata berbasis komunitas.

Pengembangan desa wisata mencakup berbagai aktivitas dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menarik minat wisatawan. Upaya ini melibatkan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata guna memenuhi kebutuhan para wisatawan selama berkunjung. Penting pula untuk memperhatikan *indigenous*

knowledge Potensi lokal yang dimiliki oleh komunitas setempat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Karangasem (dalam Yusuf A. Hilman et al., 2018, yang dikutip dalam Kusumastuti, R., 2020).

1.5.8 Kerangka berpikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Peran *stakeholders* merupakan serangkaian kegiatan dalam mengetahui pengaruh, kepentingan, dan juga kekuatan Para pihak yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Berjo pada Wisata Alam Jumog di Kabupaten Karanganyar. Analisis *Stakeholders* dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu dengan mengidentifikasikan *stakeholders* itu sendiri dan Mengkaji peran

stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Berjo pada Wisata Alam Jumog, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Berjo pada Wisata Alam Jumog, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dapat dikategorikan ;

1. Mendiskripsikan peran *stakeholder* dalam proses pengembangan desa wisata di desa Berjo pada Wisata Alam Jumog, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat dari tingkat power dan juga kepentingannya. Berdasarkan Tugas dan fungsi serta posisi dan kedudukan *stakeholders* ;

- 1) *Policy Creator*, pemangku kepentingan yang berperan dalam pengambilan dan menentukan kebijakan Pengembangan Desa Wisata di Desa Berjo pada Wisata Alam Jumog, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
- 2) *Coordinator*, *stakeholders* yang mengkoordinasikan *stakeholder* lain pada upaya pengembangan Desa Wisata Berjo pada Wisata Alam, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
- 3) *Facilitator*, *stakeholders* yang berperan dalam pemberian fasilitas terhadap kelompok sasaran pada Pengembangan Desa Wisata di Desa Berjo pada Wisata Alam Jumog, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
- 4) *Implementor*, *stakeholders* yang berperan melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Desa Berjo pada Wisata Alam Jumog, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

- 5) *Accelerator*, pemangku kepentingan yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi pada pelaksanaan program pada pengembangan Desa Wisata Berjo pada Wisata Alam, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

Tabel 1. 4 Tabel Fenomena

Fenomena (Definisi)	Sub Fenomena	Gejala Yang diamati
<i>Policy Creator</i> menilai apakah kebijakan, aturan, dan regulasi yang dibuat sudah memadai sebagai dasar pengelolaan dan pengembangan wisata.	Kejelasan kebijakan pengelolaan wisata	Keberadaan peraturan desa/kebijakan terkait dengan pengelolaan wisata
	Kebijakan apa saja yang telah dibuat BUMdes sebagai pengelola	-Peraturan-peraturan yang ada untuk pengembangan wisata. -Mekanisme pengambilan keputusan kebijakan oleh BUMDes
<i>Coordinator</i> menilai sejauh mana komunikasi antar-stakeholder mampu menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan wisata	Koordinasi antar lembaga (desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, pelaku usaha).	Pola komunikasi antara lembaga dan bentuk koordinasi yang dilakukan. Pokdarwis masih minim informasi, sistem komunikasi BUMDes dengan aktor lain belum jelas.
	Sinkronisasi program antara <i>stakeholders</i>	Upaya penyelarasan progra, antar aktor dan mekanisme pelaporan koordinasi kegiatan wisata
<i>Facilitator</i> menilai apakah fasilitas, dan pelatihan yang diberikan <i>stakeholder</i> memadai untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata.	Penyediaan dan adanya dukungan pelatihan bagi pelaku wisata	Bentuk pelatihan yang dilakukan dan Pelatihan untuk pelaku wisata yang masih jarang dilakukan
	Menyediakan sarana dan prasarana untuk forum koordinasi	-keberadaan forum koordinasi antara <i>stakeholders</i> -Bentuk dukungan <i>stakeholders</i> dalam

		menyediakan sarana pendukung forum diskusi
<i>Implementator</i> menilai sejauh mana program dan kegiatan pariwisata dijalankan sesuai rencana serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.	Pelaksanaan program pengembangan wisata	Program perawatan fasilitas wisata tidak rutin karena keterbatasan dana
	Pengelolaan atraksi dan event wisata	Atraksi wisata terbatas pada potensi alam (air terjun), inovasi atraksi budaya atau kuliner masih minim
	Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata	Peran masyarakat lokal dalam kegiatan wisata
<i>Akselerator</i> menilai apakah dapat mendorong dan mempercepat pengembangan Desa Wisata Berjo melalui dukungan <i>eksternal</i> .	Dukungan aktor <i>eksternal</i> dalam pengembangan wisata	Bentuk dukungan dari pihak <i>eksternal</i> , dan juga minimnya dukungan yang mendorong pengembangan wisata
	Peningkatan promosi digital	Promosi yang masih terbatas
	Pengembangan jejaring dengan agen wisata dan investor.	Belum ada terobosan dalam menjalin kerja sama dengan travel agent atau investor untuk mempercepat pertumbuhan wisata.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025

1.7 Metode Penelitian

Studi ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan mengeksplorasi beragam fenomena, kejadian, keyakinan, sikap, serta dinamika aktivitas sosial, baik yang terjadi pada individu maupun kelompok. Sukmadinata (2009) dalam Pharamita.V. (2019) menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena yang dianggap relevan dengan isu-isu sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi makna di balik

perilaku atau fenomena sosial tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2015) dalam Pharamita.V. (2019).

Pada Analisis ini, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan eksplorasi. Penelitian eksplorasi digunakan sebagai langkah awal untuk menjelajahi suatu isu secara luas dan mendalam. Yusuf (2004) dalam Pharamita.V. (2019) menyatakan bahwa tujuan penelitian eksplorasi adalah untuk mengidentifikasi ide-ide yang lebih detail mengenai masalah utama dan mengembangkan dasar bagi penelitian lanjutan, termasuk merumuskan hipotesis.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirancang untuk menggali fenomena dalam konteks sosial secara autentik, menggambarkan permasalahan sosial berdasarkan dari perspektif perilaku individu. Peneliti melakukan analisis terhadap fenomena yang muncul dan menyajikannya pada bentuk laporan analisis yang mendalam.

1.7.1 Tipe Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menyajikan data sebagaimana adanya, tanpa mengubah bentuk, simbol, atau angka. Peneliti mengadopsi Studi ini mengusung pendekatan deskriptif kualitatif, yang Bertujuan untuk menguraikan fenomena atau ciri-ciri individu, kondisi atau kelompok tertentu dengan tepat. Metode ini bertujuan menghasilkan suatu deskripsi atau narasi tentang sebuah fenomena, tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel atau menguji hipotesis. Dalam studi ini, analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis kasus, di mana analisis

dilakukan secara mendalam (*in-depth study*) untuk memberikan gambaran yang terorganisasi dan menyeluruh mengenai unit sosial yang diteliti.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Berjo, yang berada di wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan fokus pada kawasan Wisata Alam Jumog. Wisata Alam Jumog, sebagai salah satu daya tarik utama Desa Wisata Berjo, menjadi pusat kegiatan pariwisata dengan berbagai fasilitas dan aktivitas berbasis alam serta budaya lokal. Penelitian dilakukan dalam situasi alami tanpa manipulasi latar (*setting*) untuk menjaga keaslian data. Metode yang digunakan dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peran berbagai stakeholder yang terlibat, seperti pemerintah desa, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan (Pokdarwis) atau komunitas, dalam rangka pengembangan pariwisata di kawasan ini. Lokasi penelitian ini relevan dengan tujuan studi, yaitu mengidentifikasi kontribusi *stakeholder* terhadap pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Berjo.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu dan kelompok memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam tentang pengembangan pariwisata di Desa Wisata Berjo, khususnya di kawasan Wisata Alam Jumog. Subjek penelitian meliputi:

1. Perangkat Desa

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan desa wisata, perangkat desa diharapkan memberikan informasi terkait kebijakan, perencanaan, dan dukungan yang diberikan untuk pengembangan pariwisata.

2. BUMDes

BUMDes ini memiliki peran penting dalam pengelolaan operasional dan kegiatan pariwisata. Mereka diharapkan mampu memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan, promosi, dan pelibatan masyarakat lokal. BUMDes merupakan pengelola utama destinasi wisata di Desa Berjo

3. Komunitas BENTUR

Kelompok masyarakat yang sebagian besar sangat berpartisipasi dalam aktivitas wisata di Wisata Alam Jumog di Desa Berjo.

4. Masyarakat Tourism

Pengunjung wisata yang dapat berperan dalam menilai bagaimana wisata tersebut berjalan dengan penilaian terhadap fasilitas serta pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata.

5. Pelaku Usaha Pariwisata

Pihak swasta, seperti pengelola tempat wisata, penyedia jasa transportasi, akomodasi, atau usaha kuliner, dapat memberikan gambaran tentang kontribusi mereka terhadap pengembangan pariwisata dan tantangan yang dihadapi.

6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

Sebagai lembaga pemerintah yang membawahi sektor pariwisata, dinas ini memberikan data terkait dukungan teknis, program pembangunan, serta sinergi dengan stakeholder lain dalam pengembangan Desa Wisata Berjo.

Tabel 1. 5 Tabel Informan

No	Informan	Keterangan	Jenis Data
1	Perangkat Desa	Mengetahui peran pemerintahan desa terhadap pengembangan Wisata Alam Jomog	Data Primer
2	BUMDes	Mengetahui pengelolaan dan alur pengelolaan pariwisata	Data Primer
3	Komunitas	Mengetahui pelaksanaan kegiatan wisata oleh masyarakat	Data Primer
4	Pelaku Usaha	Mengetahui kontribusi dan kendala usaha dalam sektor pariwisata dalam pengembangan desa wisata	Data Primer
5	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar	Mengetahui peran pembinaan dan pelatihan terhadap pengembangan desa wisata	Data Primer
6	Masyarakat Turism	Sebagai penilai apakah pengembangan desa wisata telah berjalan semestinya	Data Primer

1.7.4 Jenis Data

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memprioritaskan penjabaran yang mendalam dari cerita, simbol, dan makna. Selain observasi di lapangan dan wawancara langsung dengan informan, pendekatan eksploratif juga digunakan untuk mendapatkan penjelasan tentang fenomena sosial yang diteliti. Tujuannya

adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara aktor, dinamika sosial, dan realitas yang berkembang di masyarakat setempat.

1.7.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam. Narasumber meliputi stakeholder terkait seperti perangkat desa, anggota Pokdarwis atau komunitas, masyarakat lokal, dan pelaku usaha pariwisata di Wisata Alam Jumog.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh berasal dari berbagai dokumen, laporan, serta literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. pengembangan pariwisata di Wisata Alam Jumog. Sumber data sekunder mencakup arsip pemerintah, publikasi media, artikel, dan referensi ilmiah lainnya. Jenis data ini memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti, baik dari perspektif perilaku, kebijakan, hingga kondisi sosial-budaya masyarakat di lokasi penelitian.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam dengan menggali berbagai informasi dari narasumber atau situasi penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai teknik yang sesuai dengan sifat penelitian. Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. Pengamatan (*Observation*)

Teknik pengamatan melibatkan peneliti dalam mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan situasi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pengamatan dilakukan terhadap kegiatan wisata di Wisata Alam Jumog, termasuk interaksi antara masyarakat lokal, pengelola wisata, dan wisatawan. Peneliti juga mencatat kondisi fasilitas wisata, tata ruang, dan aktivitas promosi yang dilakukan oleh *stakeholder*. Pengamatan ini membantu memberikan gambaran yang faktual dan relevan tentang fenomena yang sedang diteliti tanpa adanya manipulasi.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara menggali informasi secara langsung dari narasumber utama yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan aparat desa, anggota Pokdarwis atau komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, sehingga narasumber dapat memberikan pandangan mereka secara mendalam terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata. Teknik ini membantu peneliti memahami sudut pandang individu terhadap fenomena yang diteliti.

3. Wawancara Kualitatif (*Qualitative Interviewing*)

Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara kualitatif bersifat lebih fleksibel dan informal. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan dari narasumber yang mungkin tidak menjadi fokus utama, seperti wisatawan atau pihak luar yang pernah berinteraksi dengan Desa Wisata Berjo. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh data tentang pengalaman, opini, atau kesan yang dirasakan oleh pihak lain terhadap potensi wisata desa tersebut.

4. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan tahunan, data statistik kunjungan wisatawan, kebijakan pariwisata, atau arsip media terkait Desa Wisata Berjo. Teknik ini berguna untuk melengkapi data primer dengan informasi yang sudah tersedia sebelumnya. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh bukti-bukti yang mendukung hasil penelitian dan menambah validitas data. Dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang luas dan mendalam tentang peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Wisata Alam Jumog. Setiap teknik memiliki keunggulan tersendiri, sehingga saling melengkapi untuk menghasilkan data yang akurat dan kaya informasi.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman (1994) menggambarkan analisis data kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, menampilkan data, mendapatkan data dan menarik

dan verifikasi kesimpulan. Berikut merupakan penjelasan dari setiap tahapan Miles dan Huberman (1994);

1. mendapatkan data, pada bagian ini adanya proses memilih, memusatkan dan memfokuskan perhatian, menyederhanakan, merangkum, serta mentransformasi data mentah,
2. menampilkan data, pada bagian ini adanya penampilan data yang telah didapatkan sebelumnya kedalam suatu bentuk agar kedepannya dapat membantu dalam penarikan sebuah kesimpulan analisis,
3. Menarik dan verifikasi kesimpulan, bagian ini berisikan proses untuk menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sekaligus adanya kegiatan verifikasi bahwa kesimpulan yang telah di tarik merupakan kesimpulan yang terdapat data dukung yang mana data dukung ini adalah data data yang telah dikumpulkan dan di analisis sebelumnya.

1.7.8 Kualitas Data (*Goodness Criteia*)

Penelitian Kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan sebuah data dengan cara sistematis, ngurutkan sesuai dengan kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa serta dari sumber observasi ataupun wawancara yang telah dilakukan (M. Rahardjo., 2014). Dalam penelitian kualitatif, kualitas data sangat penting karena memastikan pemahaman yang akurat terhadap konteks dan makna fenomena, meningkatkan kredibilitas hasil, dan mengurangi risiko kesalahan interpretasi dan bias. Data yang kaya juga memungkinkan analisis yang

menyeluruh dan mendalam, dan menjadi landasan untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena ketidakjelasan dalam analisis pengukuran, hasil penelitian kualitatif yang lebih relatif menimbulkan keraguan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian tidak memiliki garis hitam dan putih yang jelas, sehingga sangat mungkin terjadi bias atau penyimpangan dalam hubungan antara fakta satu sama lain, hubungan antar data, bahkan konstruksi fenomena. Seorang periset harus memahami kriteria kesahihan (validitas) sebelum dapat menjawab keraguan tersebut dan memastikan hasil perisetan yang telah dilakukan benar (Zamili, 2015, hlm. 283) yang dikutip oleh (Vera Nurfajriani et al., 2024). Meskipun banyak orang belum memahami makna dan tujuan triangulasi dalam perisetan, triangulasi adalah teknik untuk menghilangkan keraguan. Jenis triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber dan teknik.

1. Triangulasi Sumber

Menguji data dari berbagai sumber atau informan yang akan diambil dikenal sebagai triangulasi sumber. Teknik ini dapat meningkatkan kredibilitas data dengan mengevaluasi data yang dikumpulkan selama perisetan melalui berbagai sumber atau informan (Vera Nurfajriani et al., 2024). Menggunakan teknik triangulasi sumber, periset berusaha membandingkan data yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber untuk mencapai kesimpulan. Sumber atau informan perisetan digunakan sebagai cara untuk membandingkan informasi yang mereka peroleh untuk menentukan kebenaran informasi yang mereka peroleh (Sugiyono, 2016) dalam (Vera Nurfajriani et al., 2024).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi kedua ini digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya data. Ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode untuk menentukan kebenaran data terhadap sumber yang sama (Vera Nurfajriani et al., 2024). Maksudnya, periset menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, mereka dapat menyilangkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dan kemudian menggabungkannya untuk membuat kesimpulan (Sugiyono, 2014) dalam (Vera Nurfajriani et al., 2024). Triangulasi teknik berarti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Kualitas data sangat penting dalam penelitian Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Berjo, Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar karena ini memungkinkan pemahaman yang mendalam dan akurat tentang peran berbagai pihak dalam pengembangan desa wisata. Salah satu cara untuk menjaga kualitas dan kredibilitas data adalah dengan melakukan triangulasi sumber, yang berarti membandingkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti perangkat desa, pengelola desa Metode ini memungkinkan peneliti menggunakan berbagai perspektif untuk mengevaluasi dan memverifikasi kebenaran data. Selain itu, digunakan triangulasi teknik yang berarti pengumpulan data dari sumber yang sama menggunakan berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggabungkan metode-metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan mendukung kesimpulan ilmiah yang valid.